

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026



**Disusun Oleh :
DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan *Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 – 2026* Dinas Perikanan Kota Pasuruan

Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Perikanan Kota Pasuruan ini dibuat dalam rangka menjadi acuan bagi Dinas Perikanan Kota Pasuruan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021 - 2026 RENSTRA ini berisi gambaran pelayanan Dinas Perikanan, isu – isu strategis, visi dan misi Walikota, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan dinas serta rencana program dan kegiatan tahun 2021 – 2026. Disamping itu, RENSTRA ini memuat indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

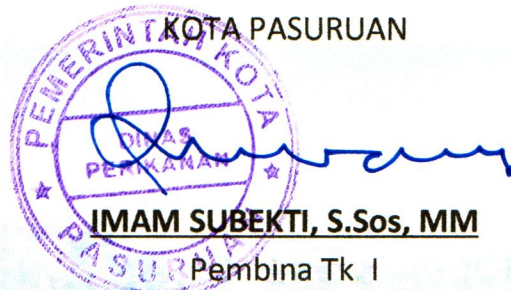
Untuk melaksanakan keberhasilan dan mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Walikota maka semua unit organisasi, pimpinan maupun staf harus melaksanakan kebijakan secara akuntabel dan disiplin dalam kinerja

Kami menyadari bahwa RENSTRA Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan

Pasuruan, 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA PASURUAN



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM

Pembina Tk I

NIP 19730709 199201 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II-III
BAB I PENDAHULUAN	1
1 1 Latar Belakang	1-2
1 2 Landasan Hukum	2-5
1 3 Maksud dan Tujuan	5-6
1.4 Sistematika Penulisan	6-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN	8
2 1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Pasuruan	8-10
2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kota Pasuruan	10-15
2 3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pasuruan	16-19
2 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pasuruan	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN	21
3 1 Identifikasi Permasalahan Terhadap Tugas, Pokok Dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Pasuruan	21-23
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih	24-25
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Jawa Timur	26-28
3 4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29-31
3 5 Penentuan Isu- isu Strategis ..	32-33

BAB IV TUJUAN dan SASARAN	34
4 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kota Pasuruan	34-36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37-40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	41-44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45-46
BAB VIII PENUTUP	47
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan sektor perikanan dan kelautan Kota Pasuruan berorientasi pada pembangunan kelautan perikanan secara nasional dan dirumuskan dengan kondisi wilayah serta tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Dimana setiap program-program yang dirumuskan harus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan kemajuan zaman demi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kebijakan pembangunan perikanan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang sistematis yang disusun berdasarkan program-program pembangunan yang relevan. Secara yuridis formal dijabarkan kedalam perencanaan pembangunan lima tahunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan dalam perencanaan program pembangunan Kota Pasuruan. Program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) sektor Perikanan dan Kelautan Kota Pasuruan.

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2021- 2026 disusun sebagai penjabaran yang memuat Visi, Misi dan Tujuan lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pasuruan, secara spesifik akan memuat Indikasi Program dan Kegiatan bidang-bidang yang menjadi kompetensi organisasi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan Kota Pasuruan jangka menengah. Dengan penetapan rencana ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Perencanaan strategi instansi pemerintah memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain khususnya dalam pelaksanaan

kegiatan setiap tahun sesuai program kegiatan yang telah ditetapkan sehingga mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, nasional dan global.

Penetapan tujuan, sasaran dan kebijakan adalah tupoksi, susunan organisasi, keadaan pegawai, sarana/prasarana dan kemampuan pembiayaan. Perencanaan strategi instansi pemerintah merupakan acuan dalam setiap pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana strategis Dinas Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ‘
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah ke-2 kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan , Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan SPM;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 7 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011–2031
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011–2031;
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005–2025
27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026

28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
29. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kota pasuruan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Pasuruan dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
- b. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah, khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Kota Pasuruan dengan Renstra Dinas Perikanan Kota Pasuruan.
- c. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam urusan kelautan dan perikanan dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Pasuruan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Perikanan Kota Pasuruan adalah :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Perikanan Kota Pasuruan.
- c. Sebagai acuan dalam merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan.
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.

e. Sebagai dasar tolok ukur dalam penyusunan evaluasi kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Dinas Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 disusun dalam beberapa Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN

- 2.1 Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Pasuruan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kota Pasuruan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pasuruan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Pasuruan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Terhadap Tugas, Pokok Dan Fungsi Dinas Perikanan Kota Pasuruan Telaahan Terhadap Visi dan Misi Walikota Pasuruan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Dan Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Jawa Timur

3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu- isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kota Pasuruan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Lampiran

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN

Dinas Perikanan Kota Pasuruan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perikanan Kota Pasuruan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang perikanan.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan.
4. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan kerja sama penyelenggaraan perikanan.
5. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perikanan; dan
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan Kota Pasuruan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 2 (dua) Kepala Bidang. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat dan 2 bidang tersebut sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a) Pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Perikanan;
- b) Pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;

- c) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d) Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perikanan di luar pengadaan bangunan;
- e) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f) Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan.

2) Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perikanan tangkap yang meliputi pemberdayaan nelayan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- a) penyusunan perencanaan bidang perikanan tangkap;
- b) perumusan kebijakan teknis bidang perikanan tangkap;
- c) pelaksanaan kebijakan teknis perikanan tangkap;
- d) pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pemberdayaan nelayan dan pengelolaan sarana prasarana perikanan tangkap; dan
- e) pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang perikanan tangkap.

3) Bidang Budidaya Perikanan

Bidang Budidaya Perikanan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang budidaya perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Budidaya Perikanan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan perencanaan bidang budidaya perikanan;
- b) perumusan kebijakan teknis bidang budidaya perikanan;
- c) pelaksanaan kebijakan teknis bidang budidaya perikanan;
- d) pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pembinaan budidaya dan produksi perikanan serta pengelolaan sarana prasarana budidaya perikanan; dan
- e) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja bidang budidaya perikanan.

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN

1. Struktur Organisasi

Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang membawahi seorang sekretaris dan 2 (dua) orang kepala bidang, yaitu kepala bidang perikanan tangkap dan budidaya perikanan serta membawahi kelompok jabatan fungsional.

Sekretaris di dalam menjalankan tupoksinya membawahi 2 (dua) orang kepala sub bagian, yaitu kepala sub bagian penyusunan program dan keuangan dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian. Masing- masing kepala sub bagian membawahi beberapa orang jabatan fungsional umum.

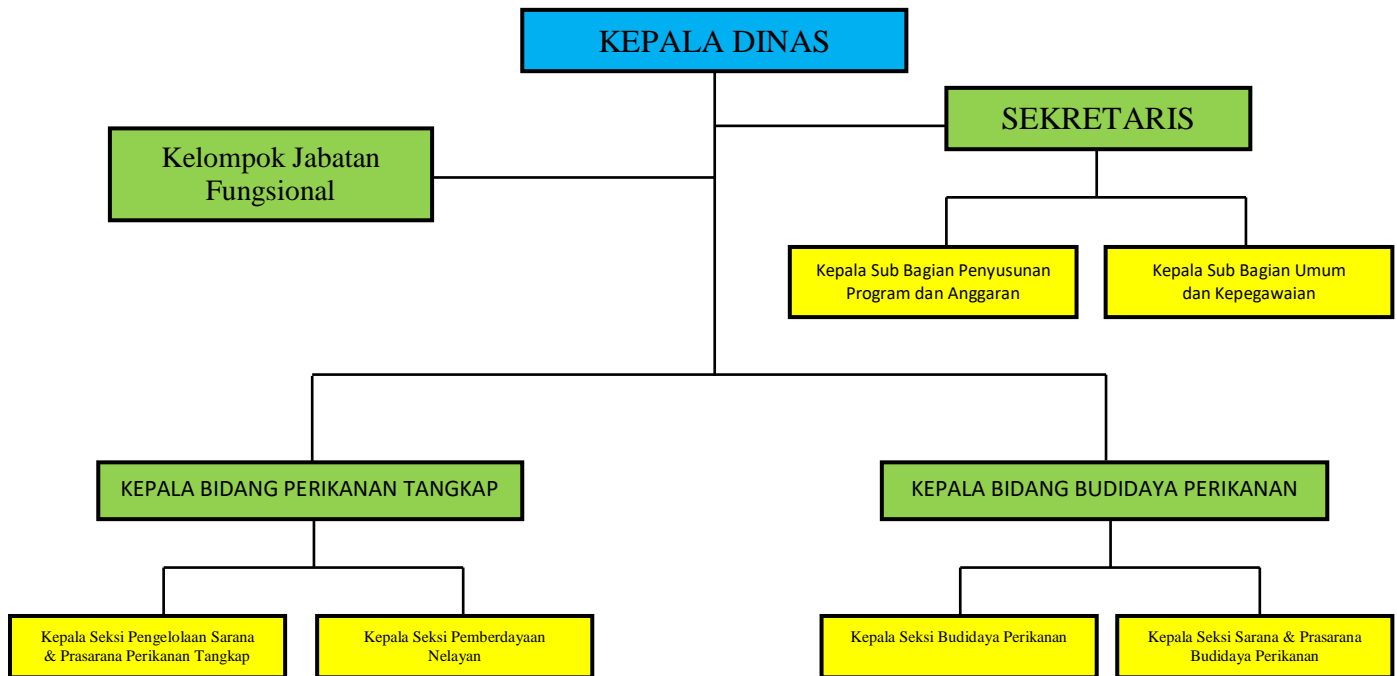
Kepala Bidang Perikanan Tangkap di dalam menjalankan tupoksinya dibantu oleh 2 (dua) orang kepala seksi, yaitu kepala seksi pemberdayaan nelayan dan kepala seksi pengelolaan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Masing- masing kepala seksi membawahi beberapa orang jabatan fungsional umum.

Kepala bidang budidaya perikanan di dalam menjalankan tupoksinya dibantu oleh 2 (dua) orang kepala seksi, yaitu kepala seksi budidaya perikanan dan kepala seksi sarana dan prasarana budidaya perikanan. Masing- masing

kepala seksi membawahi beberapa orang jabatan fungsional umum. Adapun Struktur Organisasi Dinas Perikanan tertuang dalam **Gambar 2.1**

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan



Sumber : Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Perangkat Daerah

2. Jumlah Personil Yang Dimiliki Menurut Tingkat Pendidikan serta Pangkat dan Golongan

Jumlah karyawan Dinas Perikanan sebanyak 38 Orang, Terdiri dari 21 orang PNS, 4 orang PNS Fungsional, 4 orang Penyuluh Perikanan Bantu (kontrak KKP) dan 9 orang Tenaga Harian Lepas (PHL). Adapun keadaan pegawai Dinas Perikanan Kota Pasuruan dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1.
Klasifikasi Pegawai Dinas Perikanan berdasarkan status kepegawaian
Tahun 2021

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A,	ASN			
	1. Pegawai Negeri Sipil	9	16	25
	2. PPPK	-	-	-
B	Non ASN			
	1. Tenaga Kontrak (TK)	2	2	4
	2. Pegawai Harian Lepas (PHL)	8	1	9
	JUMLAH	19	19	38

Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Perikanan Tahun 2021

Tabel 2.2
Klasifikasi PNS Dinas Perikanan berdasarkan golongan
Tahun 2021

NO.	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	3	2	5
2.	Golongan III	4	10	14
3.	Golongan II	1	4	5
4.	Golongan I	1	-	1
	JUMLAH	9	16	25

Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Perikanan Tahun 2021

Tabel 2.3
Klasifikasi PNS Dinas Perikanan berdasarkan tingkat pendidikan

T

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 3			
2	Strata 2	3	3	6
3	Strata 1	4	9	13
4	Diploma 3	1	1	2
5	Diploma 1	-	-	-
6	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	-	3	3
7	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	1	-	1
	JUMLAH	9	16	25

Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Perikanan Tahun 2021

Tabel 2.4
Klasifikasi PPPK Dinas Perikanan berdasarkan tingkat pendidikan
Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	-	-	-
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	-	-	-
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-

Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Perikanan Tahun 2021

Tabel 2.5
Klasifikasi Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Perikanan berdasarkan tingkat pendidikan
Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	-	-	-
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	-	-	-
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	-	-	-
	JUMLAH			

Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Perikanan Tahun 2021

Tabel 2.6
Klasifikasi PHL Dinas Perikanan berdasarkan tingkat pendidikan
Tahun 2021

NO.	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Strata 2	-	-	-
2	Strata 1	2	1	3
3	Diploma 3	-	-	-
4	Diploma 1	-	-	-
5	Sekolah Menengah Atas/Sederajat	7	-	7
6	Sekolah Memengah Pertama/Sederajat	-	-	-
	JUMLAH	9	1	10

Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Perikanan Tahun 2021

3. Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki

Keberadaan sarana dan prasarana yang ada saat ini merupakan suatu piranti yang menunjukkan kekuatan untuk kelancaran pencapaian sasaran dan tujuan program kegiatan yang telah ditentukan. Adapun Daftar Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kota Pasuruan sampai dengan saat ini disajikan pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7

Jumlah Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Dinas Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2021

	JENIS BARANG	BANYAKNYA (BUAH)
I.	BARANG TIDAK BERGERAK	
	1. Bangunan Ruangan Tata Usaha	1
	2. Bangunan Ruangan Bidang Perikanan	1
	3. Bangunan Ruang Pertemuan	1
	4. Bangunan Ruang Laboratorium	1
	5. Bangunan Gudang	1
	6. Pos Keamanan	2
II	BARANG BERGERAK	
	1. Kendaraan Roda Empat	3
	2. Kendaraan Roda Dua	15
III	BARANG PERALATAN KANTOR	
	1. Komputer	9
	2. Mesin Ketik	1
	3. Meja Kerja dan Kursinya	29
	4. Filing Cabinet	4
	5. Almari Besi	2
	6. Almari Kayu	5
	7. Kipas Angin Berdiri	4

8. Meja Kursi Tamu	1
9. OHP	1
10. Kursi Rapat	100
11. Kompor LPJ + Tabung LPJ	1
12. Wire USS	1
13. Kalkulator	6
14. Pompa Air	2
15. Telepon	1
16. Televisi	2
17. AC	6
18. Jam dinding	4
19. White Broad	2
20. Laptop / Notebook	7
21. Lemari es	2
22. Kamera digital	2
23. Handycam	1
24. Sound system	1
25. Papan data	1
26. Mesin potong rumput	1
27. Dispenser	2
28. Genset	1
29. Mix warless	1
30. Printer	10
31. Alat Laboratorium	43

Sumber : Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas Perikanan

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN

Dinas Perikanan Kota Pasuruan termasuk dalam urusan pilihan dan bukan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga tidak dapat mengukur Standart Pelayanan Minimal (SPM). Pada tahun 2010-2016 Dinas Perikanan masih berupa Bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan Kota Pasuruan baru terbentuk pada tahun 2017. Dengan demikian pada tahun 2021 – 2026 Dinas Perikanan memiliki indikator kinerja dan realisasi pendapatan seperti tampak pada **Tabel 2.8** dan **Tabel 2.9**.



Tabel 2.8

Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2016 – 2020

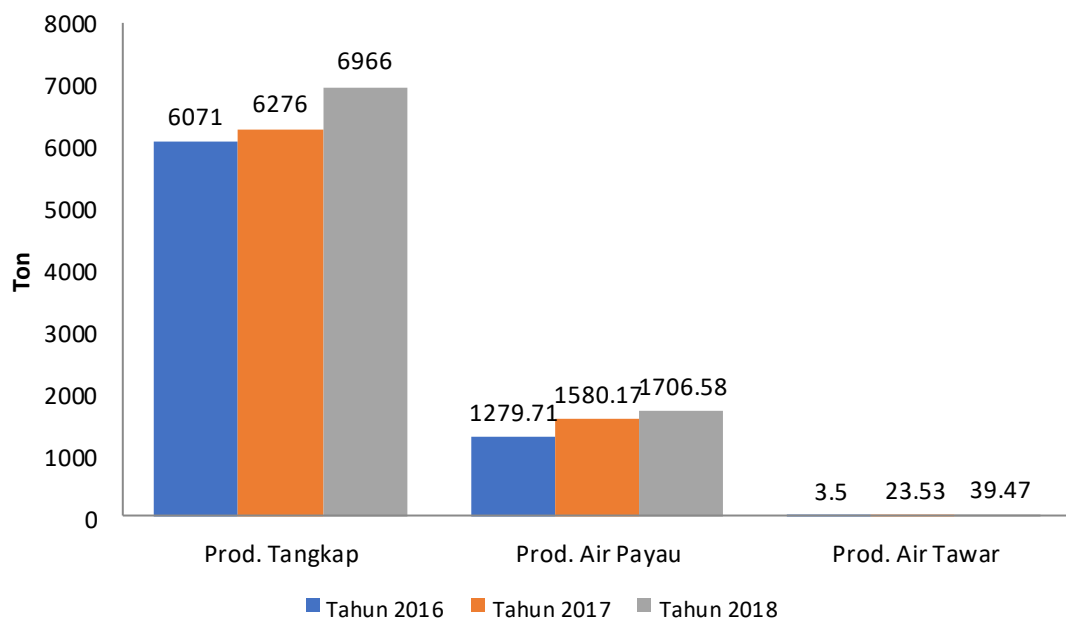
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Produksi Perikanan Tangkap				4327.00	6275.00	7029.12	7872.61	8817.33	4871.36	6275	6966.9	6325.9	7708.9	112.58	100.00	99.11	80.35	87.43
Produksi Perikanan Budidaya Air Payau				1431	1580.17	1705.58	1843.11	1990.55	1457.45	1580.73	1788.91	1788.91	1930.66	101.85	100.04	104.89	97.06	96.99
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar				22.78	23.54	25.42	27.46	29.65	23.98	22.98	39.79	93.412	245.17	105.27	97.62	156.53	340.17	826.88
Kontribusi Sub Sektor Perikanan pada PDRB				63369.40	71779.51	74530.97	79314.82	83455.97	49428.13	53834.63	56643.54	57899.82	58419.18	0.78	0.75	0.76	0.73	0.7
Tingkat Konsumsi Ikan				33.03	34.56	34.56	34.62	34.66	31.2	31.79	34.56	34.86	37.2	94.46	91.98	100.00	100.69	107.33

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2021

Pada tahun 2018, produksi perikanan tangkap ditargetkan sebanyak 7.029,12 ton telah terealisasi sebanyak 6.966,00 ton, dengan realisasi prosentase sebesar 99,10 %. Produksi Perikanan budidaya air payau ditargetkan sebanyak 1.706,58 ton dan telah terealisasi sebanyak 1.710,21 ton dengan realisasi prosentase sebesar 100,21 %. Produksi Perikanan budidaya air tawar ditargetkan sebanyak 25,42 ton dan telah terealisasi sebanyak 39,47 ton dengan realisasi prosentase sebesar 155,27 %. Kontribusi sub sektor perikanan pada PDRB tahun 2018 ditargetkan sebesar 0,86%. Sedangkan tingkat konsumsi ikan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 34,56 Kg/Kapita dan terealisasi sebesar 34,75 Kg/Kapita.

Capaian realisasi kinerja urusan perikanan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah seperti grafik dibawah ini :

Tabel 1 Grafik Realisasi Kinerja Indikator Produksi Perikanan Tahun 2016 s/d 2018



Sedangkan Pada tahun 2019, produksi perikanan tangkap ditargetkan sebesar 7.872,61 ton telah terealisasi sebesar 6.325,90 ton, dengan realisasi prosentase sebesar 80,35%. Produksi Perikanan budidaya air payau ditargetkan sebesar 1.780,00 ton dan telah terealisasi sebesar 1.788,91 ton dengan realisasi prosentase sebesar 100,50%. Produksi Perikanan budidaya air tawar ditargetkan sebesar 90,56 ton dan telah terealisasi sebesar 93,42 ton dengan realisasi prosentase sebesar 103,16%. Realisasi kontribusi sub sektor perikanan

pada PDRB di tahun 2019 sebesar Rp. 57.899,82, Konsumsi ikan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 34,56 Kg/Kapita dan terealisasi sebesar 34,86 Kg/Kapita.

Tercapainya indikator kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan didukung dengan Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN

Tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan Kota Pasuruan antara lain yaitu :

1. Terjadinya *overfishing* di Selat Madura
2. Berkurangnya kawasan perikanan budidaya
3. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha perikanan yang kurang merata
4. Tuntutan penyediaan produk berdaya saing
5. Belum optimalnya pemasaran produk perikanan
6. Belum terbentuknya Badan Usaha Perikanan

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kelembagaan Dinas Perikanan dan tenaga penyuluh perikanan sebagai ujung tombak dalam pembangunan sektor Perikanan yang ada di Kota Pasuruan;
2. Semakin bertambahnya jumlah pelaku usaha di bidang perikanan;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil perikanan semakin tinggi;
4. Inovasi dan diversifikasi produk perikanan yang semakin berkembang
5. Produk perikanan memiliki nilai gizi (protein dan omega) tinggi

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN

Tugas Dinas Perikanan Kota Pasuruan adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang perikanan.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perikanan.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan.
4. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan kerja sama penyelenggaraan perikanan.
5. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bidang perikanan.
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, Dinas Perikanan Kota Pasuruan masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya:

1. Belum optimalnya pemanfaatan pengelolaan produksi perikanan

Saat ini di Kota Pasuruan pengelolaan produksi perikanan masih belum optimal baik dari segi penangkapan ikan maupun budidaya perikanan serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pemasaran hasil olahan produk perikanan.

2. Meningkatnya populasi nelayan

Wilayah pengelolaan laut Kota Pasuruan berada di Selat Madura yang notabene telah mengalami lebih tangkap (*overfishing*), dengan jumlah armada penangkapan yang sangat banyak, sehingga sering kali terjadi benturan kepentingan antara nelayan satu dengan nelayan lainnya dalam mendapatkan

daerah penangkapan (*fishing ground*). Untuk mengatasi masalah ini nelayan bisa andon di daerah lain dengan potensi sumberdaya perikanan yang lebih besar dengan tingkat pemanfaatan yang masih rendah.

3. Terjadinya penurunan luas tambak dan kualitas tambak

Penurunan luas tambak disebabkan oleh alih fungsi lahan tambak menjadi bukan tambak. Disamping itu, tambak- tambak di Kota Pasuruan mengalami penurunan kualitas tambak akibat dari petambak tidak menggunakan cara budidaya ikan yang baik (CBIB). Selain tambak ikan, di Kota Pasuruan juga terdapat tambak yang digunakan untuk budidaya garam. Kualitas garam yang dihasilkan relatif masih rendah.

4. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan tangkap / budidaya dan keluarganya

Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat baik melalui kegiatan bimbingan teknis maupun pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maupun pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

5. Keterbatasan teknologi pengolahan dan wilayah pemasaran yang masih terbatas

Keterbatasan teknologi pengolahan dan pasca panen sangat berpengaruh terhadap kemampuan dan kreatifitas mereka dalam mengolah hasil tangkapan / budidaya nelayan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai tambah olahan perikanan. Sementara wilayah pemasaran masih kurang maksimal dikarenakan minimnya pengetahuan jaringan dan akses pasar.

6. Keterbatasan sektor finansial untuk pengembangan usaha perikanan

Sebagian nelayan baik perikanan tangkap maupun budidaya mengalami kekurangan modal / dana sehingga diperlukan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha perikanan.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Proiritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penyediaan dan penataan sarana & prasarana tempat pelelangan ikan (TPI)	Kondisi TPI saat ini tidak memenuhi syarat	Nelayan kurang leluasa untuk menjual hasil tangkapannya untuk memperoleh harga yang lebih baik
2	Terjadinya lebih tangkap (<i>overfishing</i>)	Meningkatnya populasi nelayan	Kurangnya kegiatan sosialisasi pada nelayan
3	Terjadinya penurunan luas tambak dan kualitas tambak	- Luas tambak berkurang akibat alih fungsi lahan - Kualitas tambak menurun	Penurunan luas dan kualitas tambak berakibat menurunnya produksi perikanan
4	Rendahnya pengetahuan dan keterampilan nelayan tangkap maupun budidaya	Sebagian besar nelayan tangkap maupun budidaya mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang rendah terkait pengolahan ikan laut	Kurang berkembangnya rasa keingintahuan nelayan terhadap perbaruan pengetahuan dan ketrampilan di bidang perikanan sehingga berimbas terhadap rendahnya nilai tambah perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
5	Keterbatasan teknologi pengolahan dan wilayah pemasaran yang masih terbatas	Masih rendahnya teknolog dan pengetahuan dalam pengolahan dan pemasaran produk perikanan	Kurangnya sarana dan prasarana teknologi dan pengetahuan pengolahan dan pemasaran produk perikanan
6	Keterbatasan sektor finansial yang memadai	Perlunya bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha perikanan	Kurangnya bantuan modal usaha pengembangan usaha perikanan

Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 -2026

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 berpedoman pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2021-2026 yang merupakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan 2021-2026 diarahkan untuk mewujudkan kondisi akhir sebagai berikut: **”Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka rumusan misi pembangunan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan;
2. Membangun Kota Yang Indah Dan Nyaman Melalui Konektivitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Berkelanjutan;
3. Memantapkan Kehidupan Masyarakat Multikultural Yang Harmonis Dengan Modal Sosial Yang Tangguh Serta Jaminan Akses Pendidikan Dan Kesehatan Yang Merata;
4. Transformasi Layanan Publik Yang Mudah Dan Cepat Melalui Digitalisasi Manajemen Dan Birokrasi Yang Adaptif.

Dari keempat misi pembangunan Kota Pasuruan tersebut di atas, misi nomor 1 (satu) yaitu “Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan” merupakan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan.

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perikanan Kota Pasuruan terhadap pencapaian visi, misi dan program Walikota Pasuruan dituangkan dalam **Tabel 3.2**

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan
Terhadap Pencapaian Misi dan Program Walikota Pasuruan tahun 2021 –2026

Visi Walikota Pasuruan 2021 – 2026 : Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis				
No	Misi dan Program Walikota Pasuruan 2016-2021	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Misi : Mempercepat Pertumbuhan Dan Ketahanan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja Dan Pengurangan Kemiskinan</p> <p>Program :</p> <p>1. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan nelayan baik tangkap maupun budidaya - Keterbatasan teknologi pengolahan & pasca panen - Perlunya modal usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan formal SDM nelayan tangkap maupun budidaya relatif rendah - Kurangnya sarana & prasarana teknologi pengolahan & pasca panen - Kurangnya modal usaha 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan walikota dalam menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 - 2026

3.3 TELAAHAN TERHADAP RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI JAWA TIMUR

3.3.1 TELAAHAN TERHADAP RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Salah satu misi pembangunan Nasional yang terkait dengan pembangunan perikanan dan kelautan adalah Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional, mengacu pada misi tersebut maka ada 3 pilar yang menjadi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yaitu mewujudkan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang berdaulat guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan dan meancerminkan kebhidiian bangsa indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni Mewujudkan pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan;
3. Kesejahteraan (Prosperity) yaitu, Mewujudkan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkebhidiian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Kedaulatan (Sovereignty), yaitu :
 - a. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - b. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni :
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keamanan hayati laut

- b. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
 - c. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan.
3. Kesejahteraan (Prosperity) , yakni:
- a. Mengembangkan Kapasitas SDM dan pemberdayaan Masyarakat
 - b. Mengembangkan inovasi ilmu Pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan.

Tabel 3.3 Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Renstra PD	Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Meningkatnya Produksi Perikanan	Industrialisasi KP berdaya saing : 1. Produksi Perikanan 2. Produksi Garam	Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan, teknologi pengolahan pasca panen serta keterbatasan daya dukung financial/permodalan	Berkurangnya kawasan budidaya perikanan serta tuntutan penyediaan produk perikanan yang berdaya saing	meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat berimbas pada meningkatnya permintaan masyarakat akan produk perikanan



3.3.2 TELAAHAN TERHADAP RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI JAWA TIMUR

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur yang mengacu pada misi pertama RPJMD yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah” dengan sasaran “ Meningkatkan nilai tambah produksi Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Hal tersebut di tuangkan dalam tujuan dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa timur, yakni “ Meningkatkan PDRB sub Kategori Perikanan”, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan
- b. Meningkatnya nilai tambah sub kategori Perikanan
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.4 Telaahan terhadap Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Renstra PD	Renstra PD Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan, teknologi pengolahan pasca panen serta keterbatasan daya dukung financial/permodalan	Berkurangnya kawasan budidaya perikanan serta tuntutan penyediaan produk perikanan yang berdaya saing	meningkatnya konsumsi ikan di masyarakat berimbas pada meningkatnya permintaan masyarakat akan produk perikanan

3.4 TELAAHAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana tata ruang wilayah kota/kawasan perkotaan merupakan rencana pemanfaatan ruang wilayah kota/kawasan perkotaan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan hasil telaahan Struktur ruangan Kota Pasuruan kawasan Utara wilayah Kota Pasuruan merupakan kawasan yang dominan dipergunakan untuk kawasan tambak, yaitu mencapai 534 Ha. Arah perubahan penggunaan lahan tambak menjadi jalan lingkar utara dan perluasan sektor industri dan jasa sangat berpengaruh pada produktifitas perikanan budidaya untuk itu Dinas Perikanan harus bisa mengarahkan petambak di Kota Pasuruan untuk menggunakan Teknologi tepat guna, misalnya melalui penggunaan bibit unggul perikanan. Sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah kota pasuruan luas area perikanan menurun menjadi 143 Ha. Hal ini berbeda dengan luasan lahan perikanan yang tercantum dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2021. Dalam rincian RDTR dituliskan bahwa luasan area perikanan di wilayah Kelurahan Blandongan seluas 208,81 Ha, luasan mangrove yang dicadang untuk existensi mangrove di Kota Pasuruan seluas 66,71 Ha dan luasan lahan perikanan yang direncanakan untuk menjadi zona pariwisata seluas 130,79 Ha, hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya masih luas potensi perikanan yang bisa digali dan dikembangkan di Kota Pasuruan . Adapun telaahan

tata ruang terkait dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perikanan tertuang dalam **Tabel 3.4**.



Tabel 3.4

Telaahan Tata Ruang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas, Pokok Dan Fungsi Dinas Perikanan

No	Rencana Struktur Ruang/ Pola Ruang	Struktur Ruang / Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh rencana Struktur Ruang / Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Jalan Lingkar Utara	Kawasan Tambak Ikan dan Garam	Jalan Lingkar Utara	Berkurangnya Produksi Perikanan Budidaya dan kesejahteraan keluarga nelayan dan pelaku industri perikanan	Diarahkan melalui Peningkatan Intensifikasi Budidaya Perikanan dan diversifikasi produk perikanan unggulan serta digitalisasi pemasaran produk
2	Pengembangan sentra industri perdagangan, jasa dan properti	Kawasan Tambak Ikan dan Garam	Sentra Industri Perdagangan, Jasa dan Properti		

Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

3.5 PENENTUAN ISU- ISU STRATEGIS

Penyelenggaraan urusan Kelautan Dan Perikanan, diarahkan menunjang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya perikanan melalui perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan hasil tangkap perikanan, urusan Kelautan Dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan melalui program dan kegiatan secara berkelanjutan.

Secara umum, kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan Dan Perikanan beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan hasil yang positif. Secara umum, kinerja beserta program dan kegiatan pendukungnya, menunjukkan prospek yang positif. Namun dalam pencapaiannya ditemukan beberapa kendala dan permasalahan yang mendasari terbentuknya beberapa isu strategis

Isu-isu strategis yang dihadapi dalam proses pembangunan di berbagai negara, termasuk di dalamnya pembangunan kelautan dan perikanan, antara lain mencakup desentralisasi, liberalisasi dan privatisasi serta demokratisasi. Suatu konsekuensi logis bagi kelautan dan perikanan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah perumusan strategi menyikapi isu strategis tersebut. Konsekuensi serta strategi baru tersebut semestinya mendapat perhatian dan pemikiran yang mendalam sehingga kelautan dan perikanan tetap memiliki komitmen kuat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dengan sasaran akhir peningkatan kesejahteraan nelayan. Berikut Isu- isu strategi Dinas Perikanan Kota Pasuruan:

1. Meningkatnya populasi nelayan dan area penangkapan yang *over fishing*;
2. Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya;
3. Berkurangnya kawasan perikanan dan menurunnya kualitas lahan budidaya;
4. Kurangnya sarana prasarana dan teknologi perikanan yang memadai;
5. Belum optimalnya pemerataan upaya Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan ;
6. Kurangnya diversifikasi, daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan;

Tabel 3.5

Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
1 Keterbatasan sarana dan prasarana produksi perikanan	1 Meningkatnya populasi nelayan dan area penangkapan yang <i>over fishing</i> ;
2 Keterbatasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan teknologi pengolahan pasca panen	2 Belum optimalnya pertumbuhan produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya;
3 Keterbatasan daya dukung financial/permodalan	3 Berkurangnya kawasan perikanan dan menurunnya kualitas lahan budidaya;
	4 Kurangnya sarana prasarana dan teknologi perikanan yang memadai;
	5 Belum optimalnya pemerataan upaya Peningkatan SDM pelaku usaha perikanan ;
	6 Kurangnya diversifikasi, daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan;

4.1 TUJUAN

Tujuan Dinas Perikanan merupakan penjabaran atau implementasi misi sehingga harus konsisten dengan tugas dan fungsi dinas. Tujuan yang ditetapkan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang muncul dan teridentifikasi dalam kajian analisa lingkungan internal dan eksternal.

Tujuan organisasi merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan, guna mempertajam fokus pelaksanaan misi dinas dan meletakkan kerangka prioritas agar pelaksanaan program kegiatan dapat terfokus dan mengarah pada satu hasil yang diharapkan.

Dengan demikian tujuan dari Dinas Perikanan Kota Pasuruan yaitu **“Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan”**. Untuk dapat meraih tujuan yang ada, ada hal-hal yang perlu direalisasikan secara nyata terlebih dahulu dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan bagi pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan.

4.2 SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (tahunan). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategi. Dalam 5 tahun kedepan Dinas Perikanan Kota Pasuruan telah menetapkan sasaran kinerja yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu **“Meningkatnya Produksi Perikanan”**.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan
Kota Pasuruan

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET RENSTRA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sektor Perikanan (dalam juta)	62.588	65.514	68.440	71.366	74.292	77.218
	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan (%)	5	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2021

**CASCADING RENSTRA
DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN
TAHUN 2021-2026**



5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Strategi adalah cara, lebih tepatnya jalan yang ditempuh, untuk mewujudkan Visi Dinas Perikanan Kota Pasuruan 2021-2026, diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat perikanan. Hal ini tertuang dalam strategi pokok pembangunan perikanan sebagai berikut: “Meningkatkan produksi perikanan melalui peningkatan SDM, pengembangan sarana prasarana dan teknologi serta inovasi yang berkelanjutan dan berdaya saing”. Hal tersebut dijabarkan sebagai strategi dinas perikanan kota pasuruan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Nelayan
2. Bantuan Premi asuransi nelayan
3. Penguatan kelompok usaha bersama
4. Pengembangan/fasilitasi armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang rama lingkungan
5. Percepatan peningkatan produksi perikanan budidaya melalui intensifikasi lahan budidaya
6. Pengembangan pakan ikan mandiri sebagai upaya meminimalisir biaya pakan
7. Penguatan infrastruktur perikanan budidaya meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak maupun jalan produksi
8. Peningkatan SDM melalui bimtek dan pelatihan pengolahan hasil perikanan
9. Perluasan akses pasar baik secara konvensional maupun penerapan digital marketing
10. Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan untuk peningkatan konsumsi ikan

11. Diversifikasi Produk Hasil Perikanan

12. Pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok pengolah dan pemasar produk perikanan

B. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan merupakan kumpulan keputusan–keputusan yang:

- 1) Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.
- 2) Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan.
- 3) Menciptakan kebijakan mengarahkan pada kondisi-kondisi dimana setiap pejabat dan pelaksana di organisasi mengetahui tentang apakah mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

Adapun arah kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Perikanan Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Membangun komunikasi dengan nelayan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan
2. Penguatan perikanan budidaya sebagai upaya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan serta penyediaan protein hewani untuk konsumsi masyarakat
3. Pengembangan Pelaku Usaha Perikanan

Hubungan antara Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat dalam tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

VISI : Menjadikan Kota Pasuruan Maju, Indah dan Harmonis				
Misi I : Mempercepat Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi berbasis Potensi Lokal Untuk Membuka Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	1	Pemberdayaan Nelayan	Membangun komunikasi dengan nelayan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan
		2	Bantuan Premi asuransi nelayan	
		3	Penguatan kelompok usaha bersama	
		4	Pengembangan/fasilitasi armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang rama lingkungan	
		1	Percepatan peningkatan produksi perikanan budidaya melalui intensifikasi lahan budidaya	Penguatan perikanan budidaya sebagai upaya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan serta penyediaan protein hewani untuk konsumsi masyarakat
		2	Pengembangan pakan ikan mandiri sebagai upaya meminimalisir biaya pakan	
		3	Penguatan infrastruktur perikanan budidaya meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak maupun jalan produksi	
		1	Peningkatan SDM melalui bimtek dan pelatihan pengolahan hasil perikanan	Pengembangan Pelaku Usaha Perikanan
		2	Perluasan akses pasar baik secara konvensional maupun penerapan digital marketing	
		3	Kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan untuk peningkatan konsumsi ikan	
		4	Diversifikasi Produk Hasil Perikanan	
		5	Pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok pengolah dan pemasar produk perikanan	

Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

Tabel 5.2 Sinkronisasi Arah Kebijakan RPJMD

NO	ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	ARAH KEBIJAKAN RPJMD YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Penguatan perikanan budidaya sebagai upaya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan serta penyediaan protein hewani untuk konsumsi masyarakat	Pemenuhan Pangan yang berkualitas untuk masyarakat						
2	Pengembangan Pelaku Usaha Perikanan	Peningkatan inovasi, nilai tambah dan pemasaran olahan hasil perikanan						

Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

Tabel 5.3 Time Horison Arah Kebijakan Dinas Perikanan Kota Pasuruan

NO	ARAH KEBIJAKAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Membangun komunikasi dengan nelayan, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan						
2	Penguatan perikanan budidaya sebagai upaya peningkatan produksi, peningkatan pendapatan serta penyediaan protein hewani untuk konsumsi masyarakat						
3	Pengembangan Pelaku Usaha Perikanan						

Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026

Arah kebijakan yang dibuat pada dinas Perikanan Kota Pasuruan dilakukan sepanjang tahun 2021-2026 dengan berbagai kegiatan yang menghasilkan output berbeda di setiap tahunnya

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, Dinas Perikanan Kota Pasuruan menetapkan rencana program dan kegiatan organisasi dengan mengacu strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program-program Dinas Perikanan dibagi menjadi program umum dan program teknis. Program umum merupakan program untuk melaksanakan kebijakan operasional dan manajemen Dinas Perikanan yang meliputi ex-BAU (ex-Belanja Administrasi Umum) sehingga tidak dijabarkan dalam penetapan kinerja tahunan. Sedangkan program teknis Dinas Perikanan merupakan program untuk melaksanakan kegiatan pelayanan perikanan kepada masyarakat. Program ini dijabarkan dalam **Tabel 6.1** sebagai berikut :

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN
TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Anggaran										Kinerja Pada Akhir Periode (2026)		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	RP.
						Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya Kinerja Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi (%)		100%	3.679.208.754	100%	3.373.744.723	100%	3.711.119.192	100%	4.082.231.111	100%	4.490.454.222	100%	4.939.499.644	100%	4.939.499.644	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu		100%	20.623.850	100%	33.737.447	100%	37.111.192	100%	40.822.311	100%	44.904.542	100%	49.394.996	100%	49.394.996	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		100%	2.453.365.186	100%	2.698.995.778	100%	2.968.895.354	100%	3.265.784.889	100%	3.592.363.378	100%	3.951.599.715	100%	3.951.599.715	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prosentase laporan barang milik daerah yang tersusun tepat waktu		100%	63.772.920	100%	64.101.150	100%	70.511.265	100%	77.562.391	100%	85.318.630	100%	93.850.493	100%	93.850.493	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.01.2.005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya		100%	29.825.300	100%	43.858.681	100%	48.244.549	100%	53.069.004	100%	58.375.905	100%	64.213.495	100%	64.213.495	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran		100%	96.919.400	100%	114.707.321	100%	126.178.053	100%	138.795.858	100%	152.675.444	100%	167.942.988	100%	167.942.988	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.01.2.007	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	27.498.240	100%	67.474.894	100%	74.222.384	100%	81.644.622	100%	89.809.084	100%	98.789.993	100%	98.789.993	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpenuhi Jasa Penunjang layanan perkantoran		100%	92.411.528	100%	114.707.321	100%	126.178.053	100%	138.795.858	100%	152.675.444	100%	167.942.988	100%	167.942.988	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milikdaerah yang terpelihara		100%	158.981.796	100%	236.162.131	100%	259.778.343	100%	285.756.178	100%	314.331.796	100%	345.764.975	100%	345.764.975	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Presentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		5%	108.000.000	2%	247.683.088	2%	256.060.690	2%	261.235.211	2%	277.415.203	2%	283.342.248	2%	283.342.248	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah Data Yang tervalidasi		2 Data	8.964.000	2 kali	20.557.696	2 kali	21.253.037	2 kali	21.682.523	2 kali	23.025.462	2 kali	23.517.407	2 kali	23.517.407	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Anggaran										Kinerja Pada Akhir Periode (2026)		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	RP.
						Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.				
			Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																		
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		8239 Ton	84.996 .000	8403,7 8 Ton	194.92 6.590	8571,8 6 Ton	201.51 9.763	8743,2 9 Ton	205.59 2.111	8918,1 6 Ton	173.32 5.765	9096,5 2 Ton	132.99 0.349	9096,5 2 Ton	132.99 0.349	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		-	-	-	-	-	-	-	-	1 kali	45.000 .000	2 kali	90.000 .000	2 kali	90.000 .000	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Jumlah Kapal Ukuran <10GT Yang Memiliki Dokumen Perijinan		60%	14.040 .000	60%	32.198 .801	60%	33.287 .890	60%	33.960 .577	60%	36.063 .976	60%	36.834 .492	60%	36.834 .492	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		2%	1.306.000.000	2%	487.439.457	2%	535.518.233	2%	548.199.492	2%	584.800.994	2%	598.794.190	2%	598.794.190	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		2163 Ton	809.72 0.000	2206,2 6 Ton	302.21 2.463	2250,3 9 Ton	332.02 1.304	2295.4 0Ton	339.88 3.685	2341.3 0 Ton	362.57 6.616	2388.1 3 Ton	371.25 2.398	2388.1 3 Ton	371.25 2.398	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data yang tervalidasi		1 Data	496.28 0.000	1 Data	185.22 6.994	1 Data	203.49 6.929	1 Data	208.31 5.807	1 Data	222.22 4.378	1 Data	227.54 1.792	1 Data	227.54 1.792	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.06	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kasus pelanggaran/ilegal fishing yang ditangani		-	-	80%	25.123.840	80%	25.878.491	80%	26.279.817	80%	27.734.284	80%	28.228.793	80%	28.228.793	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.06.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Prosentase Partisipasi POKMASWAS Dalam Kegiatan Pengawasan		-	-	80%	25.123 .840	80%	25.878 .491	80%	26.279 .817	80%	27.734 .284	80%	28.228 .793	80%	28.228 .793	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		5%	425.447.400	5%	389.301.761	5%	428.660.898	5%	438.700.316	5%	467.832.775	5%	478.938.038	5%	478.938.038	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
				Persentase peningkatan produksi garam		1%		1%		1%		1%		1%		1%		1%			

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Capaian Tahun Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Anggaram										Kinerja Pada Akhir Periode (2026)		Unit Kerja perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	RP.
						Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.	Target	RP.				
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Data yang tervalidasi		3 Data	13.614.317	3 Data	12.457.656	3 Data	13.717.149	3 Data	14.038.410	3 Data	14.970.649	3 Data	15.326.017	3 Data	15.326.017	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		6300 Ton	115.72.1.693	6615 Ton	105.89.0.079	6945.75 Ton	116.59.5.764	7293 Ton	119.32.6.486	7657,65 Ton	127.25.0.515	8040.53 Ton	130.27.1.146	8040.53 Ton	130.27.1.146	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Rp. 1.600.000.000	296.11.1.390	Rp. 1.680.000.000	270.95.4.026	Rp. 1.764.000.000	298.34.7.985	Rp. 1.852.200.000	305.33.5.420	Rp. 1.944.810.000	325.61.1.611	Rp. 2.042.050.50	333.34.0.874	Rp. 2.042.050.50	333.34.0.874	Dinas Perikanan	Kota Pasuruan

Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021

Perumusan rancangan rencana strategis Dinas Perikanan Kota Pasuruan tahun 2021-2026 mengacu pada RPJPD Kota Pasuruan Tahap Pembangunan ke-3 Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Pasuruan Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, indikator kinerja sasaran Dinas Perikanan seluruhnya mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator-indikator tersebut sebagaimana tertuang dalam **Tabel 7.1**.

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Dinas Perikanan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

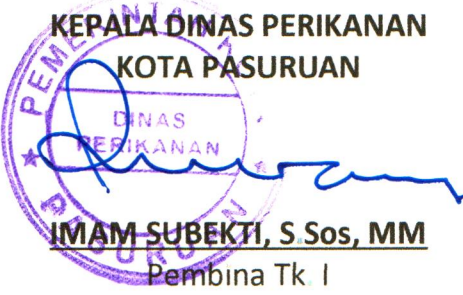
No	Indikator Tujuan, Sasaran dan Program	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Nilai PDRB Sektor Perikanan		62.588	65.514	68.440	71.366	74.292	77.218	77.218
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	10%	5%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
1	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	5 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
2	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
3	Persentase Kasus Pelanggaran / Illegal Fishing Yang Ditangani	0	0	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
4	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

Sumber : Tim Penyusun Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021

Demikian perencanaan strategis Dinas Perikanan Kota Pasuruan yang berisi kebijaksanaan, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 s/d 2026.

Dokumen ini akan menjadi lebih lengkap bilamana mendapatkan telaahan dan saran dari berbagai pihak serta dilengkapi dengan analisis lebih lanjut tentang peluang-peluang agribisnis Kelautan dan Perikanan sehingga dapat digunakan secara lebih mantap dalam setiap rencana usaha dan upaya pembangunan. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Perikanan 2021-2026 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Dinas Perikanan dan jaringannya, menerapkan nilai – nilai yang akan dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh Dinas Perikanan, diharapkan dapat memacu semangat aparat Dinas Perikanan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan ke depan.

Semoga perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan lancar dan berhasil serta bermanfaat bagi segenap lapisan masyarakat Kota Pasuruan, Amin.

**KEPALA DINAS PERIKANAN
KOTA PASURUAN**

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pembina Tk I

NIP. 19730709 199201 1 001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERIKANAN

Jl. Ir. Juanda No. 1B Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
Telp/Fax (0343) 5615594

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN

KOTA PASURUAN

NOMOR : 188/1668/423 113/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN

KOTA PASURUAN TAHUN 2021-2026

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah tahun 2021-2026 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan membentuk Tim,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa,

2. Undang-undang Nomor

- 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan,
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah,
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
- 10 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah,
- 11 Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pearngkat Daerah,
- 12 Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas :
- Merencanakan dan mempersiapkan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
 - Menghimpun, memilah, dan menganalisa data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
 - Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait,
 - Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026,
 - Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Kepala BAPPELITBANGDA
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 02 Desember 2020

**KEPALA PERIKANAN
KOTA PASURUAN**



IMAM SUBEKTI, S.Sos,MM


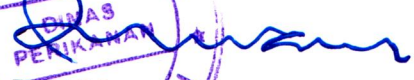
Pembina Tk I

NIP 19730709 199201 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
 NOMOR : 188/1668/423 113/2020
 TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
 STRATEGIS DINAS PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	PEMBINA	Kepala Dinas Perikanan Kota Pasuruan
2.	KOORDINATOR	Sekretaris Dinas Perikanan Kota Pasuruan
3.	KETUA I	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kota Pasuruan
4.	KETUA II	Kepala Bidang Budidaya Perikanan Kota Pasuruan
5.	SEKRETARIS	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan pada Dinas Perikanan Kota Pasuruan
6.	ANGGOTA	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Kasie Pemberdayaan Nelayan
		Kasie Pengelolaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
		Kasie Budidaya Perikanan
		Kasie Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan


**KEPALA DINAS PERIKANAN
 KOTA PASURUAN**

IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
 Pembina Tk I
 19730709 199201 1 001

LAMPIRAN I. CASCADING RENSTRA DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN TAHUN 2021 - 2026

TUJUAN RPJMD

SASARAN RPJMD

TUJUAN

SASARAN

PROGRAM

KEGIATAN

Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi yang Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Penunjang Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya Kinerja sektor Perikanan
(Nilai PDRB Sektor Perikanan)

SASARAN :
Meningkatnya Produksi Perikanan
(Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan)

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
(Persentase Produksi Perikanan Tangkap)

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
(Persentase Produksi Perikanan Budidaya)

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(Persentase kasus pelanggaran/illegal fishing yang ditangani)

Program Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan
(Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
(Persentase peningkatan produksi garam)

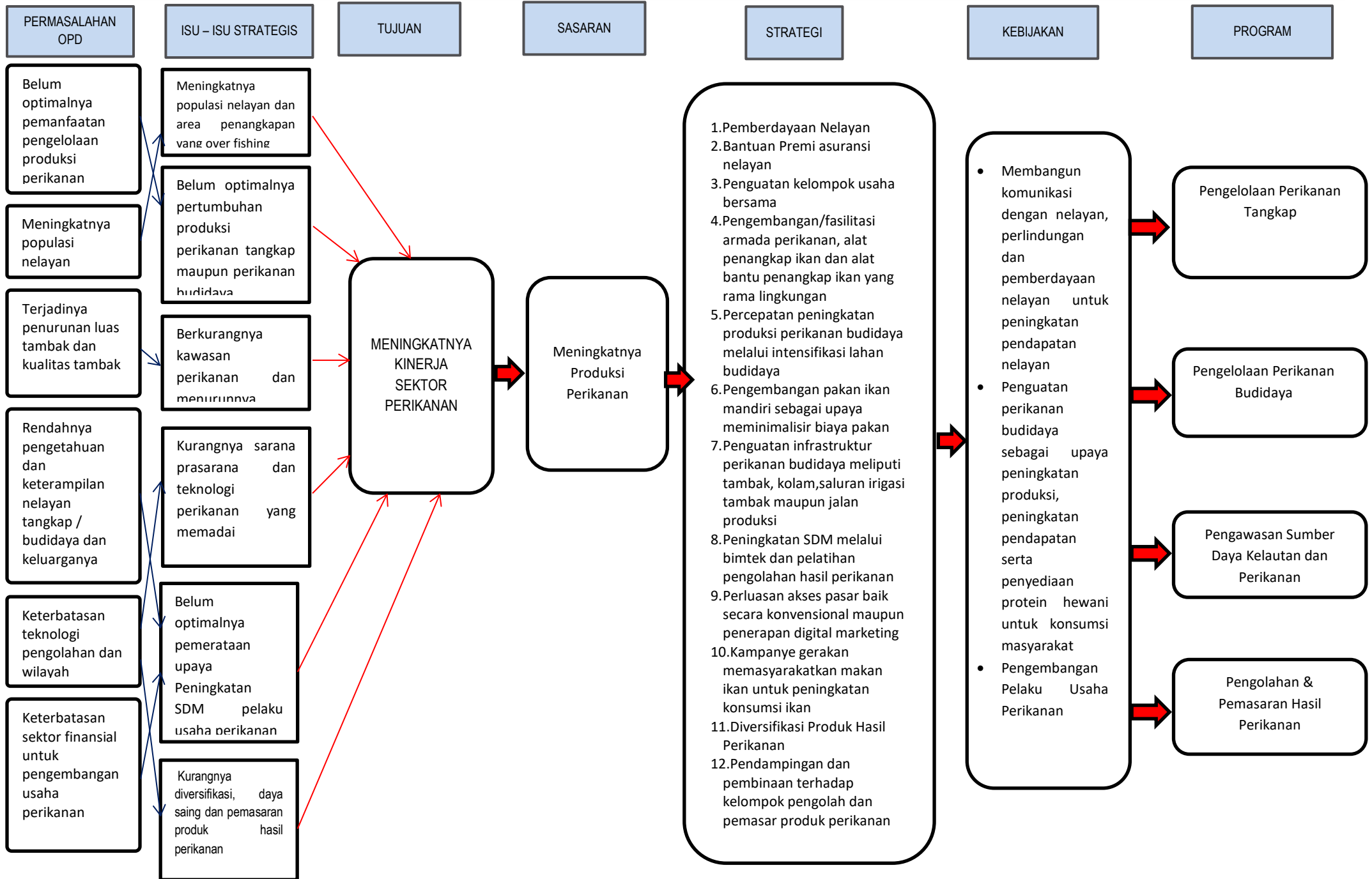
1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

1. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
3. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah

LAMPIRAN II. BAGAN RENSTRA DINAS PERIKANAN KOTA PASURUAN



LAMPIRAN III. METADATA INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERIKANAN 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	$\frac{\sum \text{Prod. Perikanan Tahun Ke } n - \sum \text{Prod. Perikanan Tahun Ke } (n-1)}{\sum \text{Prod.si Perikanan Tahun Ke } n-1} \times 100\%$	-	5	2	2	2	2	2

LAMPIRAN IV. METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM DINAS PERIKANAN 2021 – 2026

No	Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Realisasi 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	%	$\frac{\sum \text{Prod. Perikanan Tangkap Tahun Ke } n - \sum \text{Prod. Perikanan Tangkap Tahun Ke } (n-1)}{\sum \text{Prod. Perikanan Tangkap Tahun Ke } n-1} \times 100\%$	-	5%	2%	2%	2%	2%	2%
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%	$\frac{\sum \text{Prod. Perikanan Tangkap Tahun Ke } n - \sum \text{Prod. Perikanan Tangkap Tahun Ke } (n-1)}{\sum \text{Prod. Perikanan Tangkap Tahun Ke } n-1} \times 100\%$	-	5%	2%	2%	2%	2%	2%
3	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kasus pelanggaran/ilegal fishing yang ditangani	%	$\frac{\text{Kasus Yang Ditangani Tahun } n}{\text{Jumlah Kasus Tahun } n} \times 100\%$	-	-	80%	80%	80%	80%	80%
4	Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%	$\frac{\sum \text{Prod. Pengolahan \& Pemasaran Tahun Ke } n - \sum \text{Prod. Pengolahan \& Pemasaran Tahun Ke } (n-1)}{\sum \text{Prod. Pengolahan \& Pemasaran Tahun Ke } n-1} \times 100\%$	-	-	5%	5%	5%	5%	5%
		Persentase peningkatan produksi garam	%	$\frac{\sum \text{Prod. Garam Ke } n - \sum \text{Prod. garam Tahun Ke } (n-1)}{\sum \text{Prod. Garam Tahun Ke } n-1} \times 100\%$	-	-	1%	1%	1%	1%	1%